JENIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

ST. Harbiah¹, Meliana Esmiralda Wijaya², Eka Febrianti³, Saiful Muchlis⁴, Rika Dwi Ayu Parmitasari⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: harbiahabbas84@gmail.com¹, melianaesmiralda9@gmail.com², ekafebrianti1320@gmail.com³, saiful.cahayaislam@gmail.com⁴, rparmitasari@uin-alauddin.ac.id⁵

Abstrak – Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berbasis pada prinsip kemitraan atau kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih. Dalam akad ini, masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk membiayai suatu usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai jenis-jenis pembiayaan musyarakah dalam praktik perbankan syariah, serta tantangan dan peluangnya. Melalui metode kajian literatur dan pendekatan deskriptif-analitis, tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih luas terkait implementasi musyarakah di sektor keuangan syariah.

Kata Kunci: Musyarakah, Pembiayaan Syariah, Kemitraan Usaha, Perbankan Syariah.

Abstract – *Musyarakah financing is one of the Islamic financial instruments based on the principle of partnership or business cooperation between two or more parties. In this contract, each party contributes capital to finance a business, and profits are shared according to the agreement, while losses are borne based on the portion of capital. This article aims to comprehensively explain the types of musyarakah financing in Islamic banking practices, as well as its challenges and opportunities. Through the literature review method and descriptive-analytical approach, this paper is expected to contribute to a broader understanding of the implementation of musyarakah in the Islamic financial sector.*

Keywords: *Musyarakah, Islamic Financing, Business Partnership, Islamic Banking.*

PENDAHULUAN

Pembiayaan dalam dunia keuangan syariah telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghindari riba dan praktik ekonomi yang tidak adil. Salah satu instrumen utama pembiayaan syariah yang menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi Islam adalah musyarakah. Musyarakah merupakan bentuk kerjasama kemitraan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau keahlian untuk menjalankan suatu usaha bersama, dengan keuntungan dan risiko yang dibagi sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.¹

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau keahlian, serta keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.² Dalam sistem keuangan syariah, musyarakah dianggap sebagai bentuk kerjasama yang paling adil karena keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal atau kesepakatan dalam akad.

Keunggulan utama musyarakah adalah adanya prinsip keadilan, keterbukaan, dan transparansi dalam pengelolaan usaha. Setiap pihak yang terlibat memiliki hak untuk mengawasi dan mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan, serta memperoleh keuntungan dan menanggung risiko secara proporsional. Hal ini menjadikan musyarakah sebagai solusi pembiayaan yang adil dan berbasis keadilan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan usaha yang berkelanjutan.³

Dengan demikian, musyarakah tidak hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan yang kuat antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan, keterbukaan, dan keadilan. Melalui penerapan musyarakah, diharapkan dapat tercipta inklusi ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁴

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber sekunder, seperti buku-buku literatur ekonomi syariah, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, serta dokumen dan laporan praktik pembiayaan musyarakah di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan membandingkan berbagai jenis pembiayaan musyarakah yang diterapkan di perbankan syariah, serta mengkaji kelebihan, tantangan, dan studi kasus implementasi musyarakah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi dan dinamika pembiayaan musyarakah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dasar musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Secara etimologis Musyarakah atau Syirkah berarti ikhtilath (percampuran), yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara terminology Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁵

Menurut Sutan Remy Sjahdenini, musyarakah adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan, di mana bank dan nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk

membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan di awal. Sementara itu, Khotibul Umam mendefinisikan musyarakah sebagai penanaman dana dari pemilik modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana berdasarkan bagian modal masing-masing.⁶

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia menjelaskan musyarakah berarti saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (cooperation, patnership). Sedang secara istilah musyarokah adalah pembiayaan berdasarkan akas kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal kerja atau investasi, dimana dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha. (Bank Indonesia)

2. Dalil-dalil tentang Musyarakah

Musyarakah digunakan oleh ummat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis. Praktek musyarakah ini diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Surah Annisa' ayat 12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Terjemahnya:

Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.

Lafadz شُرَكَاءُ disebutkan sebanyak 13 kali dalam Al-qur'an. Surat Annisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam Musyarakah karena syirkah memiliki makna satu orang dengan yang lain bersama-sama dalam satu tujuan yang sama. Begitu-pun dalam QS. Annisa mengenai tentang waris mereka berserikat/bekerjasama dalam sepertiga untuk mendapatkan hal yang sama. Sedangkan (dua belas) 12 lafadz شُرَكَاءُ yang lainnya diartikan berbeda dengan surat Annisa, yaitu sebagai sekutu Allah, dalam arti lain menyekutukan Allah.

2. Surah Shaad ayat 24

وَإِنْ كَثِيرًا مِنْ آلِ الْخُلَطَاءِ لَيْبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عَصِيًّا وَإِلَى آلِ دِينَارٍ عَمَلُوا وَالصَّلَاتُ وَالْقِيَامُ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.

Ada kesamaan diantara surat Annisa ayat 12 dengan surat Shaad ayat 24 yakni dari sisi obyek. Dalam surat Annisa obyeknya yaitu berupa modal dalam bentuk warisan baik itu berupa uang maupun barang berharga lainnya sedangkan dalam surat shaad berupa biri-biri, pihak pertama memiliki 99 (sembilan puluh sembilan) biri-biri dan pihak kedua 1 (satu) biri-biri yang digabungkan menjadi satu untuk tujuan yang sama yakni mendapatkan keuntungan. Keduanya surat yang berbeda sama-sama dalam bentuk modal untuk siap dikelola baik itu harta warisan maupun biri-biri atau domba.⁷

Sedangkan untuk hadits Musyarakah yakni hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَ بَيْنَ مَالٍ مِثْلَ مَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَّ جُثْمًا مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:

"Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah

mengkhiatinya, maka aku keluar dari keduanya. (H.R Abu Daud 2936).

Hadist memberikan penjelasan bahwa selama tidak ada yang berkhianat dalam suatu kerjasama apapun bentuknya termasuk usaha/perniagaan atas sesuatu yang halal maka Allah akan memberikan keberkahan didalamnya karena Allah ada diantara mereka yang bersekutu tersebut. Namun sebaliknya jika yang bersekutu tersebut untuk sesuatu yang diharamkan maka Allah sudah pasti akan memerikan sanksi/adzab yang berat. 8

Rukun dan Syarat Musyarakah

Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai rukun syirkah namun ulama telah memutuskan rukun syirkah yang kompleks yaitu diantaranya: 9

1. Sighat (ijab dan qabul)

Sebuah akad musyarakah dikatakan sah apabila terdapat kalimat akad yang dimana mengandung izin dari mitranya untuk membelanjakan sebuah objek syirkah yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan akadnya para pihak yang bersangkutan harus menyampaikan secara lisan maupun tertulis term and condition dari akad tersebut. Maksud dari hal tersebut adalah untuk mengantisipasi sebab maupun akibat yang terjadi dari akad tersebut karena telah menimbulkan akibat hukum.

2. Al 'Aqidain (dua orang yang melakukan akad)

Syarat sebuah akad musyarakah adalah orang yang melakukan akad itu sendiri dimana orang tersebut harus berakal, baligh dan juga merdeka atau dengan kata lain mereka sedang tidak dalam paksaan. Jika yang melakukan sebuah akad tersebut adalah anak-anak maka anak tersebut harus didampingi oleh seorang wali.

3. Ma'qud 'alaih (obyek akad)

Dalam musyarakah modal dan kerja merupakan objeknya dimana kedua objek tersebut dalam pembagiannya harus sesuai dengan kesepakatan oleh dua belah pihak.

Berikut ini merupakan syarat umum syirkah yang terbagi dalam tiga hal yaitu:10

1. Perserikatan atau aliansi dalam transaksi bisa diwakilkan
2. Dalam perserikatan atau aliansi yang dilakukan presentase keuntungan harus sudah dibagi di dalam akad.
3. Dalam hal ini keuntungan tidak berasal dari harta lain melainkan berasal dari perserikatan tersebut.

Berikut ini adalah syarat khusus pelaksanaan syirkah al-uqud, yaitu:

1. Modal dalam perserikatan atau aliansi harus jelas dan tunai bukan utang maupun barang.
2. Modal yang digunakan adalah berupa alat pembayaran.
3. Akad yang sudah disepakati harus terdapat sebuah modal atau harta.

Jenis-Jenis Musyarakah

Menurut Wahbah Zuhaili, akad Musyarakah terbagi menjadi empat, yaitu 11:

1. Syirkah al-'inan

Syirkah al-'inan adalah kontak antara dua orang atau lebih, setiap orang memberikan suatu porsi dari modal dan partisipasi dalam kerja semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati oleh mereka, namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi modal kerja maupun bagi hasil) tidak harus sama atau identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka.

Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan praktik ini dengan memilih salah satu alternative berikut:

- a. Keuntungan yang dapat dibagisesuaidengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.
- b. Keuntungan bisa dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing berbeda.
- c. Keuntungan bisa dibagi tidak sama tapi kontribusi dana yang diberikan sama.

Mazhab Maliki dan Syafi'i menerima jenis akad musyarakah ini dengan syarat, keuntungan dan kerugian dibagi secara proposional sesuai distribusi dana yang ditanamkan. Musyarakah jenis ini yang diaplikasikan dalam perbankan syariah. Syirkah al-inan ini para pihak berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama.

2. Syirkah Al Mufawadah

Akad syirkah al Mufawadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, pembagian untung dan rugi secara sama, dengan demikian syarat utamanya adalah kesamaan dana, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi masing-masing pihak secara sama. Para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama.

3. Syirkah al-a'mal

Musyarakah dalam hal ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek. Disini terjadi pencampuran jasa, keahlian/ketrampilan dari pihak yang berserikat.

4. Syirkah al-wujuh

Akad ini adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan tanpa adanya uang cash, dan kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah ini tidak memerlukan modal, karena pembelian barang dilakukan secara kredit dan berdasarkan jaminan orang yang bersekutu.

Terjadinya percampuran antara modal dengan reputasi/nama baik seseorang, lazim disebut musyarakah piutang.

Analisis Implementasi Musyarakah Di Perbankan Syariah

1. Kelebihan Pembiayaan Musyarakah

a. Keadilan dalam Bagi Hasil

Akad musyarakah menekankan prinsip keadilan dalam pembagian hasil usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal akad, bukan berdasarkan bunga tetap seperti pada sistem konvensional. Hal ini memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik bank maupun nasabah, karena keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal atau kesepakatan.

Sumber: Prinsip bagi hasil ini diakui sebagai prinsip utama dalam akad musyarakah, di mana keuntungan dibagi secara adil sesuai kesepakatan awal, dan kerugian juga ditanggung bersama sesuai proporsi kepemilikan modal.¹²

2. Peningkatan Produktivitas

Usaha Sistem musyarakah mendorong pelaku usaha untuk bekerja lebih optimal karena keuntungan yang diperoleh bergantung pada performa usaha. Semakin baik kinerja usaha, semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh semua pihak. Dengan demikian, nasabah terdorong untuk mengelola usahanya secara profesional dan bertanggung jawab. Sumber: Prinsip partisipasi dan transparansi dalam musyarakah mendorong semua pihak untuk aktif mengelola usaha, sehingga produktivitas usaha meningkat.

3. Hubungan Kemitraan yang Setara

Tidak ada pihak yang mendominasi dalam musyarakah, karena semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Bank dan nasabah saling menjaga aset bersama dan berhak mengambil keputusan penting terkait usaha. Hubungan ini menciptakan iklim bisnis yang sehat dan saling menguntungkan.

Sumber: Bank dan nasabah sama-sama memiliki klaim atas aset dan keuntungan, sehingga tercipta hubungan kemitraan yang setara dan saling menjaga.

2. Tantangan Implementasi

a. Asimetri Informasi

Bank sering mengalami kesulitan dalam memantau kegiatan usaha mitra secara efektif karena ketidakseimbangan informasi antara bank dan nasabah. Nasabah lebih memahami kondisi usahanya, sedangkan bank hanya mengandalkan data yang diberikan nasabah dan hasil verifikasi. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko gagal bayar dan penurunan kualitas pembiayaan.

Sumber: Asimetri informasi menyebabkan bank tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen (nasabah), sehingga diperlukan proses screening dan verifikasi yang ketat sebelum pembiayaan disetujui.¹³

b. Risiko Moral Hazard

Mitra usaha bisa saja melaporkan keuntungan yang lebih rendah dari yang sebenarnya, atau melakukan manipulasi biaya untuk memperoleh bagian keuntungan yang lebih besar. Perilaku ini dapat merugikan bank dan menimbulkan risiko penurunan kualitas pembiayaan.

Sumber: Studi kasus di Bank BNI Syariah menunjukkan adanya perilaku moral hazard, seperti manipulasi biaya dan mark-up, yang dapat merugikan bank.

c. Kompleksitas Administrasi dan Pengawasan

Dibandingkan dengan pembiayaan murabahah, musyarakah memerlukan pengawasan dan laporan keuangan yang lebih ketat. Proses administrasi yang rumit, penyesuaian regulasi, serta kebutuhan edukasi nasabah menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi musyarakah.¹⁴ Sumber: Implementasi musyarakah di bank syariah sering terkendala oleh kompleksitas administrasi dan kurangnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad.¹⁵

3. Studi Kasus: Aplikasi Musyarakah di Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri (sekarang bagian dari Bank Syariah Indonesia) telah menerapkan berbagai bentuk musyarakah, terutama untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Bank melakukan pengawasan ketat mulai dari proses penelitian, pelaksanaan, hingga evaluasi pembiayaan. Pendekatan berbasis kemitraan dan pembinaan usaha digunakan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keberhasilan usaha nasabah. Bank juga melakukan edukasi kepada nasabah terkait hak, kewajiban, dan mekanisme musyarakah, serta berupaya menyederhanakan proses administrasi agar lebih efisien dan transparan.

Sumber:

1. Pengawasan Pembiayaan: Bank Syariah Mandiri melakukan pengawasan pada setiap tahap pembiayaan, mulai dari penelitian hingga evaluasi, untuk memastikan nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran bagi hasil.
2. Pendekatan Kemitraan: Bank berupaya membina usaha nasabah melalui pendampingan dan dukungan teknis, sehingga risiko kegagalan usaha dapat diminimalisir.
3. Edukasi dan Simplifikasi Administrasi: Bank meningkatkan pemahaman nasabah melalui seminar, lokakarya, dan materi edukasi, serta menyederhanakan proses administrasi agar lebih efisien dan transparan.

KESIMPULAN

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu instrumen utama dalam keuangan syariah yang menawarkan prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi. Jenis-jenis musyarakah, seperti syirkah al-'inan, syirkah al-mufawadah, syirkah al-a'mal, dan syirkah al-wujuh, memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah dalam menjalin kerjasama bisnis.

Kelebihan utama musyarakah terletak pada sistem bagi hasil yang adil, mendorong peningkatan produktivitas usaha, serta menciptakan hubungan kemitraan yang setara antara bank dan nasabah. Namun, implementasi musyarakah juga menghadapi tantangan, seperti

asimetri informasi, risiko moral hazard, dan kompleksitas administrasi serta pengawasan. Studi kasus di Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa penerapan musyarakah, khususnya untuk pembiayaan UKM, dapat berjalan efektif dengan pendekatan kemitraan, pembinaan usaha, dan pengawasan yang intensif. Oleh karena itu, optimalisasi pembiayaan musyarakah membutuhkan dukungan sistem pengawasan yang kuat, edukasi kepada nasabah, serta inovasi dalam produk dan layanan agar dapat meningkatkan peran musyarakah dalam perekonomian syariah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduraman Dede, "Legitimasi Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Al- Quran dan Hadits," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2.2 (2021), 248, doi:10.47453/ecopreneur.v2i2.458.
- Aisyah Dini dan Yenni Samri Julianti, "Analisis Asymmetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada," *JEPA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7.1 (2022), 107–15. Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia
- Al-Hakim, Muhammad Ibn Abd Allah. 1959. "Al-Mustadrak Ala Shahihain." *Nucl. Phys.* 13(1):104–16.
- Az-Zuhaili, Whabah. 1997. "Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu." *Darul Fikir* 11(1):1–14
- Chefi Abdul Latif. 2020. "PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*.
- D I Perbankan Syariah, "Problematika implementasi kontrak musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan rumah di perbankan syariah," 4307.1 (2025), 702–09.
- ETHIS: Prinsip bagi hasil, keadilan, dan partisipasi dalam musyarakah
- Fitri, Maltuf. 2015. "Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6(1):57–70. doi: 10.21580/economica.2015.6.1.786.
- Khalida Widya Putri, "artikel_ilmiah_khalida_widiyasari_.pdf."
- M Qoiriyah et al., "Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah ...*, 2.3 (2024), hal. <<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1097%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/1097/981>>.
- Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Musfiroh, Mila Fursiana Salma. 2016. "Musyârah Dalam Ekonomi Islam." *Syariat; Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 1(3):6–19.
- Nurnasrina, Adiyes Putra. 2018. "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", *Cahaya Firdaus*, Pekanbaru.
- Pembiayaan Usaha dan D I Bank, "Penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah," 1–10.
- Qoiriyah et al., "Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah." Ralph Adolph, "Landasan Teori Musyarakah," 2016, 1–23.
- Rani Rahayu dan M. Zidny Nafi' Hasbi, "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Keislaman*, 5.2 (2022), 176–85, doi:10.54298/jk.v5i2.3436.
- Sutan Remy Sjahdenini. (2017). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Prenada Media Group, Jakarta.